

BAB I

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang menjadi iklim dunia usaha yang kondusif.

Perseroan terbatas disingkat PT dulu lebih terkenal dengan nama N.V (Naamloze Vennotschap) yang artinya suatu bentuk usaha yang di tahun-tahun akhir banyak dipakai pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha dan sebagainya untuk mencapai maksud dan tujuannya dalam lapangan industri, perdagangan dan sebagainya.¹

Di dalam masyarakat, orang banyak menggunakan istilah PT untuk menyebut perseroan terbatas dimana istilah “perseroan” sendiri menunjuk pada cara penentuan modal sedangkan istilah ”terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu dimana modal perusahaan yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.²

Perseroan terbatas merupakan lembaga ekonomi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Lembaga ini dapat mewadahi aktivitas ekonomi yang memiliki bentangan kompleksitas dari yang sangat sederhana (melibatkan sedikit orang), sampai bentangan

¹ Rochmat Soemitro, 1933, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Bandung: PT. Eresco, hal 2.

² Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 68.

kompleksitas yang sangat tinggi (melibatkan ribuan atau bahkan ratusan ribu orang). Oleh karenanya, PT menjadi wadah untuk melakukan aktifitas ekonomi paling banyak dipergunakan oleh pelaku ekonomi ketimbang bentuk usaha yang lain.³

Dilihat dari jumlahnya, Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk usaha yang paling sering dipilih sehingga, jumlah perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Perseroan terbatas hampir dikatakan memiliki cakupan usaha yang tidak terbatas. Sepanjang suatu bidang usaha tidak bersifat tertutup untuk diusahakan secara komersial, dan juga perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat, maka perseroan terbatas menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menjalankan perusahaan.⁴

Pada tanggal 16 Agustus 2007 peraturan yang mengatur Perseroan terbatas (PT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana undang undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun, mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶

³ Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan, Salatiga*: Griya Media, hal 5.

⁴ *Ibid*, hal 6.

⁵ Rudhi Prasetya, 2011, *Teori Dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1.

⁶ Kansil dan Cristine, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23.

Sebagai badan hukum baru, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dari saham mempunyai konsekuensi yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya.⁷

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PT. No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa :

“Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia ketentuan ini harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri dan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:

“Notaris adalah penjabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “relas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (door) notaris (sebagai penjabat umum).⁸

⁷ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 15.

⁸ Lumbang Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hal 51.

Dalam proses pembuatan akta PT, sebelumnya perseroan terbatas tersebut harus didirikan melalui suatu perjanjian tertulis antara para pihak dengan pendiri yang dituangkan dalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Tanpa adanya akta notaris maka pendirian PT tersebut tidak sah, karena kedudukan akta notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu PT selain sebagai alat bukti.⁹

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut “akta pendirian” ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dan mengelola serta menjalankan perseroan terbatas tersebut.¹⁰

Akta akta pendirian memuat apa yang dinamakan statuten atau yang disebut dengan “anggaran dasar” dari perseroan terbatas, maka yang diserahkan kepada departemen kehakiman untuk diteliti ialah praktis rancangan statuten ini sudah dibikin oleh seorang notaris. Dengan demikian akta pendirian dengan statuten ini baru dibikin secara resmi oleh notaris apabila sudah ada persetujuan dari departemen kehakiman dan pengesahan menteri kehakiman.¹¹

Menurut ketentuan Undang-Undang untuk sahnya pendirian suatu PT maka akta pendirian/naskah dari akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunannya dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN TENTANG**

⁹ Kansil dan Cristine, *Op.Cit.*, hal 6.

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 11.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, hal 59.

¹² Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 1991, *Pengertian pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 43.

**PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU
PT. No 40 Tahun 2007” (Studi Pada Kantor Notaris Di Surakarta).**

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan dimaksudkan untuk mempertegas dan mempersempit ruang lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya. Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada pelaksanaan pendirian perseroan terbatas berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 pada kantor Notaris di Surakarta, yang dalam hal ini akan mengadakan penelitian di 2 kantor Notaris yaitu:

1. Dewi Patra, S.H.
2. Toto Susmonohadi, S.H.,M.H.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana isi dan bentuk akta pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007?

3. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Notaris dalam pendirian/pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 Tahun 2007?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui Syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui isi dan bentuk akta pendirian PT berdasarkan UU PT.No 40 Tahun 2007.
- c. Untuk mengetahui Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Notaris dalam pendirian/pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 Tahun 2007?

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan skripsi ini.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam bidang penelitian hukum.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah literatur di bidang ilmu hukum.

- b. Untuk menambah wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data guna dianalisis agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara penyelesaiannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan/atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.¹³

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang diteliti, pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat yang menekankan pada aspek hukum peraturan undang-undang.

¹³ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal 77.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal 42.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu/perkembangan tentang sesuatu.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 2 Kantor Notaris yaitu:

1. Dewi Patra, S.H.
2. Toto Susmonohadi, S.H.,M.H.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer meliputi:

- a) UU PT.No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perseroan terbatas.

3) Bahan hukum tersier

¹⁵ Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 14.

Adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media, internet, kamus, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau temuan yang dihubungkan erat dengan pokok permasalahan.

b. Study lapangan

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara metode pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi hasil wawancara tertuang dalam daftar pertanyaan dan pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.¹⁶

Dalam hal ini penulis akan mengadakan wawancara dengan:

¹⁶ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 108.

1. Dewi Patra, S.H.
2. Toto Susmonohadi, S.H.,M.H.

d. Kuesioner

Pengumpulan data melalui metode koesioner, dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara:

1. Kuesioner dikirim langsung kepada responden melalui pos dengan harapan setelah diisi, dijawab, dikirim kembali kepada peneliti.
2. Kuesioner diserahkan kepada responden dengan cara menandatangani masing-masing responden agar mengisinya.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁸

Sebelum data itu dianalisis terlebih dahulu dilakukan dengan Editing dimana editing ini untuk memeriksa/meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.¹⁹

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²⁰

¹⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 54.

¹⁸ Patton, 1980, <http://cuplis.net/2009/04/07/data-dan-analisis-data/> di akses pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 pukul 22.30 WIB.

¹⁹ Roni Hanitjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 64.

²⁰ Bambang Waluyo, Op.Cit., hal 78.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)
 - 1. Pengertian PT
 - 2. Macam-Macam PT
 - 3. Modal PT
 - 4. Organ-Organ PT
- B. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Pendirian PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - 1. Pengertian Pendirian PT
 - 2. Pendirian PT Berdasarkan Perjanjian
 - 3. Tata Cara Mendirikan PT
- C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris
 - 1. Pengertian Notaris

2. Pengertian Akta Notaris
3. Macam-Macam Akta Notaris
4. Bagian-Bagian Akta Notaris

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian & Pembahasan

1. Syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007
2. Isi dan bentuk akta pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007
3. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam pendirian/pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 Tahun 2007

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN